

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Mahasiswa Administrasi Publik UIN SGD Bandung Angkatan 2022

Alifa Nurkhanza Ghaniya¹, Amalia Tiara², Apriana Khairunnisa³

¹²³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
alifanurkhanza1034@gmail.com¹, amltiara1901@gmail.com²,
aprianakhairunnisa3003@gmail.com³

Keywords:

Digital Identity
 Policy
 Implementation
 Public
 Administration
 Digital Literacy

Abstract: *This study aims to explore the implementation of Digital Identity (IKD) among students of the Public Administration Study Program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung class of 2022. The approach used is qualitative with a descriptive method. Data was obtained through in-depth interviews with students who have used the IKD application and analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory, which covers aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that students have a positive response to IKD and are quite prepared in terms of technology, but technical obstacles and information needs are still found. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that students have a positive response to DDI and are sufficiently prepared technologically, but technical challenges and additional information needs were still identified. In conclusion, students have the potential as early adopters of digital services, but optimizing the implementation of DDI requires more interactive communication strategies, equitable infrastructure distribution, and attention to data privacy security.*

Kata Kunci:

Identitas
 Kependudukan
 Digital
 Implementasi
 Kebijakan
 Administrasi Publik
 Literasi Digital

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2022. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang telah menggunakan aplikasi IKD, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki respon positif terhadap IKD dan cukup siap dari segi teknologi, namun masih ditemukan kendala teknis dan kebutuhan informasi tambahan. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki potensi sebagai pengguna awal layanan digital, namun optimalisasi implementasi IKD memerlukan strategi komunikasi yang lebih interaktif, pemerataan infrastruktur, serta perhatian terhadap keamanan data pribadi.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan digital di berbagai bidang pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menginisiasi peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi teknologi yang dirancang untuk melengkapi atau menjadi alternatif dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan versi digital dari identitas warga yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. IKD memuat data penting seperti NIK, nama, alamat, serta dokumen pelengkap lainnya seperti Kartu Keluarga, NPWP, dan BPJS. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mempercepat layanan publik, sejalan dengan penguatan konsep e-Government (Bella & Widodo, 2023). Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses informasi kependudukan tanpa perlu membawa dokumen fisik, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan dan mempercepat proses validasi data.

Meskipun aplikasi IKD mampu meningkatkan efisiensi layanan, penerapannya di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah kendala. Studi di Kecamatan Bumi Waras mengungkapkan bahwa pelaksanaan IKD terbentur oleh rendahnya literasi digital, minimnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sarana penunjang seperti perangkat teknologi dan akses internet (Djano et al., 2024). Hal yang serupa juga terjadi di Kota Padang, di mana faktor usia, tingkat pendidikan, dan kepemilikan perangkat digital menjadi penentu utama dalam penerimaan masyarakat terhadap penggunaan IKD (Asmaniah et al., 2024).

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi pengguna awal dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh dengan teknologi digital, mereka diharapkan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap inovasi layanan pemerintah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan IKD di kalangan mahasiswa masih belum maksimal. Beberapa studi mengenai partisipasi publik mengungkap bahwa meskipun mahasiswa merespons positif kemudahan yang ditawarkan IKD, terdapat

kendala seperti minimnya informasi yang diterima dan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi (Purba & Mauluddin, 2023).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana penerapan aplikasi IKD di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2022. Fokus kajian meliputi pemahaman mahasiswa terhadap IKD, tingkat penggunaan, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah persepsi mahasiswa mengenai manfaat dan aspek keamanan aplikasi IKD. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penerapan IKD di institusi pendidikan tinggi serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis digital.

Tinjauan Literatur

Konsep dan Teori yang Relevan

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan transformasi identitas fisik ke dalam bentuk digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan administrasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya secara daring. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan agenda transformasi digital pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada saat peluncuran IKD pada tahun 2022.

Untuk memahami bagaimana suatu kebijakan seperti IKD dapat diimplementasikan secara efektif, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjadi acuan yang relevan. Menurut Edwards, terdapat empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, yang merujuk pada sejauh mana informasi kebijakan tersampaikan dengan baik kepada pelaksana dan target; (2) sumber daya, mencakup ketersediaan alat, teknologi, serta keterampilan yang memadai

(3) disposisi atau sikap, yaitu kemauan dan penerimaan dari pelaksana dan penerima kebijakan; dan (4) struktur birokrasi, yang berkaitan dengan sistem, prosedur, dan alur kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Kerangka teori ini digunakan dalam banyak studi implementasi kebijakan karena memberikan pemahaman sistemik atas interaksi antara isi kebijakan, pelaksana, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam konteks IKD, keempat elemen ini relevan karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan, seperti perlunya komunikasi efektif, kesiapan teknologi, penerimaan dari masyarakat (terutama generasi muda), serta prosedur birokrasi yang sederhana dan efisien.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis implementasi IKD di tingkat daerah maupun nasional. Studi oleh Fathoni & Wijaya (2024) di Kota Pekanbaru menemukan bahwa meskipun masyarakat menunjukkan respon positif terhadap IKD karena kemudahannya, masih ada kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga menyatakan bahwa literasi digital menjadi faktor penting yang mempengaruhi adopsi IKD (Fathoni et al., 2025).

Sementara itu, Ramadhani & Prakoso (2023) dalam studi di Kota Samarinda menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa rendahnya literasi digital, akses internet yang tidak merata, serta kurangnya pemahaman teknis menjadi hambatan utama. Mereka merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan penyediaan infrastruktur teknologi untuk menunjang implementasi IKD (Putri et al., 2025).

Penelitian lainnya oleh Asmaniah et al. (2024) yang dilakukan di Kota Padang juga menunjukkan hasil serupa. Mereka menemukan bahwa faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan kepemilikan smartphone sangat mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk menggunakan IKD. Implementasi IKD di kota tersebut tergolong efektif, namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata (Online et al., 2024).

Dalam konteks sistem dan struktur organisasi, Sasongko (2023) meneliti kesiapan Disdukcapil Kabupaten Bandung. Studi tersebut menggunakan teori Edwards III untuk menganalisis keempat faktor implementasi dan menemukan bahwa struktur birokrasi

relatif sudah siap, tetapi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan utama (Sasongko, 2023).

Adapun Tukan & Rahmadanita (2023) dalam penelitian mereka di Kabupaten Lembata (NTT) menemukan bahwa realisasi aktivasi IKD masih sangat rendah. Hambatan utamanya adalah komunikasi yang belum efektif, keterbatasan SDM, dan belum tersusunnya SOP secara konsisten. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan digital yang inklusif dan penyusunan strategi internal yang lebih matang (Tukan & Rahmadanita, 2023).

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, terlihat bahwa fokus kajian implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih banyak diarahkan pada level pemerintahan daerah, perangkat instansi kependudukan, serta masyarakat umum sebagai objek penerapan layanan digital. Studi-studi tersebut memang telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai hambatan-hambatan umum seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta persoalan keamanan data pribadi. Namun demikian, belum banyak studi yang secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana IKD dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa, khususnya yang berasal dari disiplin ilmu administrasi publik.

Padahal, mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki karakteristik istimewa dalam konteks adopsi teknologi digital. Mereka adalah bagian dari generasi digital native, yang sejak awal tumbuh dan terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, mahasiswa bukan hanya menjadi target pengguna IKD, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, mahasiswa administrasi publik juga merupakan calon birokrat, pemangku kebijakan, dan pelaksana kebijakan publik di masa depan. Dengan demikian, pemahaman dan penerimaan mereka terhadap sistem administrasi digital seperti IKD menjadi sangat penting untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (gap) tersebut dengan menyajikan kajian yang lebih mendalam terhadap pengalaman mahasiswa dalam menggunakan IKD,

khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis data melalui kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan teknis penerapan IKD, tetapi juga memperhatikan faktor komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap mahasiswa terhadap inovasi digital, dan struktur birokrasi kampus yang mungkin memengaruhi penerapan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi implementasi kebijakan berbasis digital, serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi bagi pemerintah dan institusi pendidikan tinggi agar dapat lebih efektif dalam menyosialisasikan serta mengembangkan layanan administrasi kependudukan digital secara menyeluruh dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2022. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan aplikasi IKD.

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2022 yang telah mengetahui atau menggunakan aplikasi IKD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Wawancara dilakukan secara daring.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) dengan mengkategorikan data ke dalam empat komponen utama teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pengkodean data, identifikasi tema, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori yang sesuai dengan konteks Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan Mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2022, dengan menggunakan pendekatan dari George C. Edward III sebagai alat analisis untuk menilai proses implementasinya.

Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Mengacu pada teori George C. Edwards III, efektivitas komunikasi menjadi kunci agar isi kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pelaksana serta diterima oleh target kebijakan. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa, diketahui bahwa secara umum informasi terkait penggunaan dan aktivasi aplikasi IKD dinilai cukup jelas dan mudah dimengerti. Beberapa narasumber seperti Nazwa, Zahra, dan Dipa menyampaikan bahwa petunjuk yang tersedia tergolong lengkap, mencakup tahap instalasi, pemakaian, hingga proses aktivasi aplikasi.

Meski demikian, beberapa responden juga menggarisbawahi kekurangan dalam aspek komunikasi teknis. Zahra dan Nazwa, misalnya, menganggap bahwa perlu adanya informasi tambahan mengenai cara mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi, agar pengguna lebih siap menghadapi kendala di lapangan.

Selain itu, Shofa mengungkapkan bahwa penjelasan langsung di kantor Dukcapil lebih mudah dipahami dibanding hanya membaca banner atau teks tertulis. Ia menyarankan agar panduan penggunaan juga disediakan dalam bentuk video singkat yang dapat diakses dengan mudah secara daring.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun komunikasi terkait IKD sudah tergolong baik, masih dibutuhkan peningkatan dalam penyampaian aspek teknis serta penggunaan media yang lebih menarik dan interaktif untuk memperkuat pemahaman pengguna.

Sumberdaya

Dalam konteks ini, sumber daya mencakup perangkat teknologi seperti smartphone, jaringan internet, serta keterampilan pengguna dalam menjalankan aplikasi IKD. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa mereka

memiliki perangkat dan akses internet yang memadai. Nazwa, Zahra, dan Dipa menuturkan bahwa mereka tidak mengalami hambatan dalam mengakses maupun menggunakan aplikasi tersebut. Temuan ini mencerminkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara umum telah memiliki kesiapan teknologi yang cukup untuk mendukung penggunaan IKD.

Meski demikian, Shofa dan Dipa menekankan bahwa tidak semua individu memiliki tingkat akses yang setara. Shofa menyampaikan bahwa mahasiswa dari wilayah tertentu atau kalangan masyarakat tertentu masih mungkin menghadapi kendala dalam hal akses teknologi. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan digital yang perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam upaya implementasi IKD secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan kesiapan kelompok sasaran dalam menerima serta menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini, disposisi menggambarkan bagaimana mahasiswa merespons kebijakan penggunaan aplikasi IKD sebagai alternatif dari KTP fisik. Secara keseluruhan, para responden menunjukkan respons yang positif terhadap penerapan IKD. Nazwa dan Zahra menilai aplikasi ini sebagai solusi yang praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Dipa menyebutnya sebagai "terobosan yang baik," namun juga mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap keamanan data pribadi serta ancaman kejahatan siber.

Sementara itu, Shofa menyatakan dukungannya terhadap digitalisasi melalui IKD, tetapi juga menekankan pentingnya tetap menyediakan alternatif layanan konvensional bagi masyarakat yang belum siap untuk beralih ke sistem digital. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari generasi digital, cenderung menerima dan mendukung inovasi digital seperti IKD. Namun, perhatian terhadap perlindungan data pribadi dan pemerataan akses teknologi tetap menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemudahan implementasi suatu kebijakan. Bila strukturnya terlalu kompleks, hal tersebut bisa

menghambat atau memperlambat proses adopsi kebijakan. Sebagian besar responden, termasuk Dipa, Zahra, dan Nazwa, menyatakan bahwa prosedur aktivasi aplikasi IKD tergolong sederhana dan mudah dipahami. Mereka menilai proses verifikasi berjalan dengan baik dan aplikasi cukup ramah bagi pengguna.

Meskipun demikian, Shofa mengungkapkan bahwa pada tahap awal pendaftaran sempat terjadi kendala teknis, seperti kegagalan dalam verifikasi wajah atau gangguan sistem. Dipa juga menambahkan bahwa karena aplikasi jarang diakses, ia sempat lupa cara login. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur proseduralnya relatif tidak rumit, masih diperlukan perbaikan teknis dan penyederhanaan tahapan aktivasi untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna baru.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2022 cenderung positif, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan struktural. Dalam konteks teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, keempat faktor utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—telah diidentifikasi sebagai elemen yang saling memengaruhi keberhasilan penerapan IKD.

Pada aspek komunikasi, meskipun mahasiswa menilai informasi yang disampaikan cukup jelas, masih terdapat kebutuhan akan penyampaian informasi yang lebih interaktif, seperti video panduan dan media digital lainnya. Hal ini menguatkan temuan dari Bella dan Widodo (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan layanan digital sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian informasi kepada publik secara efektif.

Dalam aspek sumber daya, sebagian besar mahasiswa memiliki perangkat dan akses internet yang memadai. Namun, terdapat indikasi kesenjangan digital yang masih perlu diperhatikan, sebagaimana juga disoroti oleh Djono et al. (2024) dalam konteks pelaksanaan IKD di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Disposisi mahasiswa terhadap IKD tergolong sangat positif. Mahasiswa menganggap aplikasi ini sebagai bentuk inovasi layanan publik yang praktis dan efisien.

Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Purba dan Mauluddin (2023), kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi tetap menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan data menjadi aspek penting dalam kebijakan digital ke depan bagaimana juga disoroti oleh Djano et al. (2024) dalam konteks pelaksanaan IKD di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Struktur birokrasi dalam aktivasi aplikasi IKD dinilai relatif sederhana, namun terdapat kendala teknis pada tahap verifikasi dan penggunaan lanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Asmaniah et al. (2024) yang menekankan perlunya perbaikan sistem agar aplikasi lebih responsif dan ramah pengguna.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan yang terbatas serta tidak melibatkan analisis dari perspektif pihak instansi pemerintah (Dukcapil). Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari latar belakang sosial yang berbeda serta mempertimbangkan analisis kuantitatif guna melihat keterkaitan antar variabel secara statistik.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesiapan dan potensi besar dalam menjadi pelopor penggunaan IKD. Namun, optimalisasi implementasi tetap memerlukan strategi komunikasi yang adaptif, pemerataan infrastruktur digital, serta jaminan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola e-government yang inklusif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2022 berjalan cukup baik namun masih dihadapkan pada beberapa kendala teknis dan struktural. Mahasiswa secara umum memiliki sikap positif terhadap IKD dan mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital. Hal ini menandakan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki potensi besar sebagai pelopor dalam adopsi teknologi pelayanan publik.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar implementasi IKD menjadi lebih optimal. Di antaranya adalah kebutuhan akan komunikasi yang lebih efektif dan interaktif, pemerataan akses teknologi untuk menghindari kesenjangan digital, serta penguatan sistem perlindungan data pribadi guna membangun kepercayaan pengguna. Kendala dalam proses aktivasi dan penggunaan aplikasi juga menunjukkan perlunya perbaikan teknis serta penyederhanaan prosedur.

Kontribusi penelitian ini terhadap bidang studi administrasi publik terletak pada upayanya untuk menghadirkan perspektif baru dalam kajian implementasi kebijakan digital, khususnya dengan memfokuskan perhatian pada kelompok mahasiswa sebagai pengguna awal sistem. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan di lingkungan pendidikan tinggi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga pemerintah seperti Dukcapil maupun institusi pendidikan tinggi dalam menyusun strategi sosialisasi dan edukasi digital yang lebih efektif. Penelitian ini juga memberikan masukan kebijakan agar pengembangan aplikasi IKD tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan pengguna, kebutuhan informasi yang memadai, serta jaminan keamanan data pribadi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asmaniah, A., Pratama, N. A., Karmila, V. C., Oktaviani, W., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Implementasi Governasi Digital Dalam Penggunaan Aplikasi IKD di Disdukcapil Kota Padang. *Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*.

- Djano, R. H., Suryani, E., & Rahmaini, P. (2024). Implementasi Kebijakan IKD dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan Digital di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Fathoni, M., Riau, U. I., & Riau, U. I. (2025). Proses Adopsi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Pekanbaru *. April, 326–334.
- Purba, Y. O., & Mauluddin, A. (2023). Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online Cybercrime and Digital Population Identity Policies: A Study on the Potential of Online Data Theft. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN*, 5(2), 55– 66. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i2.113>
- Putri, K., Ramadhani, D., & Prakoso, C. T. (2025). Difusi Inovasi Aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. 6(3), 1841–1851.
- Online, I., Kependudukan, I., & Kota, D. (2024). Orasi : Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Analisis Implementasi Governasi Digital dalam Penggunaan Aplikasi IKD. 1(2), 34–43.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>